



KOMUNIKASI KESEHATAN DI ERA DIGITAL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM SOSIALISASI PROGRAM VAKSIN COVID-19

Ihsan Suri¹, Nurul Hidayat², Umar Halim³

1,3) Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Indonesia

2) Prodi Dharma Usada, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Indonesia

Abstrak

Pandemi Covid 19 sudah berjalan hampir dua tahun dan masih berlangsung hingga saat ini diseluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai strategi telah dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sosialisasi berbagai program pun dilakukan dengan komunikasi publik dalam lingkup komunikasi kesehatan. Salah satu program terbaru dalam upaya penanganan virus Covid-19 ialah dengan melakukan vaksinasi guna membentuk kekebalan tubuh terhadap virus ini. Namun agaknya pemerintah sedikit mengalami kendala dalam mensosialisasikan dan menjalankan program ini. Untuk itu diperlukan strategi yang cocok dalam upaya penyampaian komunikasi publik dalam menyampaikan informasi, mengedukasi dan mempersuasi publik agar mematuhi protokol kesehatan dan bersedia untuk divaksin. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi sosialisasi yang tepat terkait vaksinasi covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan program vaksinasi Covid-19 bergantung pada banyak faktor, dan komunikasi publik ialah menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan sosialisasi program tersebut.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Komunikasi Kesehatan, Strategi Pemerintah, Sosialisasi, Vaksin Covid-19

PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang lebih akrab di sebut dengan Covid-19 hingga saat ini masih menyebar luas dan ditetapkan menjadi pandemik keseluruh pelosok dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 pertama kali masuk ke dalam wilayah Indonesia pada awal Maret 2020. Di mana 2 orang warga negara Indonesia (WNI) melakukan interaksi dengan seorang warga negara asing yang berasal dari Jepang yang terindikasi terpapar virus Covid-19 setelah melakukan perjalanan dari Jepang. Setelah berita 2 WNI yang terpapar kemudian sembuh total, lalu disusul dengan kemunculan kasus Covid-19 baru yang kemudian menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran Covid-19 ini memberikan efek guncangan hebat bagi dunia. Beberapa kebijakan diterapkan guna menekan angka penyebaran Covid-19 nyatanya justru berdampak negatif pada aspek perekonomian. Banyak negara yang akhirnya keos dalam upaya menghadapi Covid-19. Angka pemutusan hubungan kerja semakin meningkat setiap harinya. Hal ini semakin diperburuk dengan matinya beberapa sektor perekonomian yang mengandalkan upah harian.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terkait upaya penanganan Covid-19 ini membuat hampir seluruh lini perekonomian lumpuh. Terutama pada pekerja dengan upah harian. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia anjlok diangka 2.97% akibat dari pandemik Covid-19 ini. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembatasan wilayah yang melarang masyarakat melakukan aktivitas fisik di luar rumah, serta anjuran untuk tidak ciptakan kerumunan masa dalam jumlah banyak di area publik.

Pemerintah pusat pada awal Maret 2020 membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Virus Covid-19 dalam upaya menekan penyebaran virus dimasyarakat. Beberapa skema dari pemerintah telah diberlakukan seperti menetapkan program self quarentine, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diseluruh pelosok nusantara. Kemudian pada awal 2021 Satgas Covid-19 berubah nama menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) juga beberapa program penekanan penyebaran virus Covid-19 melalui pemberlakuan jam malam di beberapa daerah yang terindikasi zona merah dan peraturan terbaru saat ini ialah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai level pada wilayah yang berbeda.

Pada akhir 2020, World Health Organization (WHO), mengumumkan bahwa pemberian vaksin adalah sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh menghadapi lonjakan virus Covid-19 yang semakin mengganans. Kondisi yang diharapkan ialah apabila 70% warga di dunia sudah mendapatkan vaksin, maka dengan sendirinya akan tercipta herd immunity. Pemberian vaskinasi Covid-19 ini kemudian baru dilakukan di Indonesia pada awal Februari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang Indonesia pertama yang menerima vaksin Covid-19 jenis Sinovac.

Adanya program vaksinasi ini tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Banyak yang ragu akan kandungan vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh mereka. Beberapa ragu termakan hoax bahwa didalam vaksin tersebut terdapat microchips yang dapat membahayakan diri mereka sendiri.

Pemerintah tidak menutup mata akan hal ini, sosialisasi secara masal

dengan menggunakan komunikasi publik dan melalui saluran media massa baik cetak, elektronik maupun digital sudah dilakukan secara terus menerus dan menggandeng beberapa pihak berwenang. Namun pemerintah masih menemui kendala dalam upaya penyebarluasan informasi penting mengenai vaksinasi Covid-19 ini. Dari itu, maka perlu diketahui bagaimana baiknya strategi pemerintah dalam sosialisasi program vaksin Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun tulisan ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau studi pustaka (*library research*) yang penulis dapatkan melalui buku-buku, karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal yang relevan dengan topik tulisan ini yaitu terkait literasi digital dan sosialisasi vaksinasi di media sosial.

Selain itu juga penulis menggunakan data-data yang didapatkan dari internet untuk membantu menjelaskan terkait literasi digital yang sudah dilakukan dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai referensi informasi kesehatan di masyarakat. *Library research* ialah dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dari bahan bacaan tersebut dilakukan pemahaman secara teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis melakukan studi literatur secara mendalam untuk mendukung terkumpulnya data penelitian yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Publik dan Komunikasi Kesehatan

Komunikasi ialah istilah yang sudah tak asing kita dengar dalam hubungan sosial keseharian. Komunikasi sendiri memiliki peranan sangat besar dalam perkembangan kehidupan setiap individu. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai komunikasi publik dan komunikasi kesehatan.

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Muhammad:2008). Judy Pearson dan Paul Nelson (2009) memberikan definisi tentang komunikasi publik (*public speaking*) sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi di mana sumber mentransmisikan pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab. Pedoman yang digunakan dalam komunikasi publik, ialah sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan untuk mencapai pemahaman maksimal. Kemudian yang menjadi inti dari komunikasi publik ialah adanya pemahaman maksimal dari publik yang dalam hal ini menjadi target sasaran utama, khususnya terkait dengan substansi pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik.

Selain perihal pemahaman pesan yang dikirimkan, aspek lain yang juga penting berkaitan dengan komunikasi publik adalah efektivitasnya dalam membendung informasi palsu (*hoax*). Dengan begitu, komunikasi publik yang efektif akan mampu mengimbangi bahkan membatasi beredarnya informasi palsu, kesalahpahaman informasi, dan isu yang kurang pas terkait suatu hal. Dalam proses penyampaiannya, komunikasi publik baiknya disampaikan melalui berbagai

varian media yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. dengan kata lain, komunikasi publik perlu dilakukan dengan berbagai macam jenis media, platform dan juga jaringan.

Berkaitan dengan komunikasi publik, salah satu literasi yang perlu diberikan kepada masyarakat ialah terkait komunikasi kesehatan. Dimana pada masa sekarang ini, masalah-masalah kesehatan yang mengenai individu atau masyarakat, sering juga diakibatkan karena masyarakat tidak menerima informasi yang tepat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan di masyarakat (Rahmadiana:2015).

Dalam konteks komunikasi kesehatan, prinsip komunikasi menitikberatkan pada strategi penyampaian informasi kesehatan, dan melakukan evaluasi terhadap informasi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat (People:2010). Ada banyak bentuk komunikasi dalam konteks kesehatan, seperti; panduan dalam pemeliharaan kesehatan, promosi kesehatan, serta aturan-aturan bisnis yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan (Rahmadiana:2015).

Peranan sistem informasi dalam bidang kesehatan (Health Information System) sangat penting, terutama dalam penyampaian informasi dan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Penggunaan electronic mail (E-mail), termasuk dalam aplikasi pertama pada penggunaan internet dan model database informasi kesehatan lain merupakan bentuk dari narrowband technology. (Riegleman, Persily: 2001).

Komunikasi kesehatan yang berjalan pada masa sekarang ini sangat berkembang pesat terlebih dengan kemudahan mengakses jejaring sosial dan dengan adanya media pengiriman pesan yang user friendly bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan berbagai golongan dan

kelompok untuk saling bertukar berbagai informasi yang berkaitan dengan kesehatan.

Pada masa genting seperti saat ini, komunikasi kesehatan sangat penting dilakukan. Pemerintah sebagai ujung tombak dalam upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19, menggandeng berbagai elemen yang dirasa berpengaruh dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah menggunakan komunikasi publik dalam mensosialisasikan literasi kesehatan dengan berbagai cara, seperti menggencarkan iklan di media massa elektronik, platform sosial media, dan melakukan boom text terkait informasi vaksinasi melalui pesan singkat telepon genggam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan terhindar dari hoax yang mungkin beredar.

Ancaman Hoax di Tengah Pandemi

Perkembangan arus informasi yang terjadi pada era digitalisasi seperti saat ini dapat dikatakan sangat cepat dan cenderung tidak dapat dibatasi. Informasi terbaru yang dibutuhkan masyarakat dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet dari berbagai sumber dan sudut pandang. Kondisi tersebut seperti menjadi dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Pada sisi pertama, masyarakat mendapatkan dampak positif akan pembaharuan informasi yang hendak mereka dapatkan dengan sangat mudah, namun di sisi yang lainnya, informasi palsu yang dibuat seolah asli menjadi sulit untuk dikendalikan. Informasi palsu yang sering kita kenal dengan hoax ini menjadi ancaman tersendiri dalam perkembangan era digital seperti saat ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan

Kehormatan Pesatuan Wartawan Indonesia (PWI), Wina Armada Sukardi, menunjukkan bahwa hoax yang paling banyak tersebar di masyarakat ialah hoax yang berkaitan dengan kesehatan. Wina berpendapat, hoax yang terdapat dibidang kesehatan ini cenderung diteruskan oleh masyarakat yang disebabkan dari kurangnya informasi mengenai hal tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 27% dari sekitar 1.000 hoax yang dijadikan sebagai sampel sekitar satu tahun yaitu sejak Februari 2016 hingga Februari 2017 ialah berita kesehatan (Media Indonesia, 2018).

Sementara itu, menurut hasil survei online mengenai keberadaan virus hoax nasional yang diadakan oleh Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) yang disebarluaskan ke publik pada 7 Februari 2017 terhadap 1.116 responden dalam waktu 48 jam ini, menunjukkan bahwa jenis hoax terkait kesehatan menempati peringkat ketiga yaitu sebanyak 41.20% berada di bawah hoax berita sosial politik dan SARA. Hal tersebut dapat diartikan bahwa isu kesehatan menjadi hal yang cukup penting untuk didiskusikan di Indonesia, terlebih lagi terdapat banyak golongan masyarakat yang belum memiliki pemahaman informasi kesehatan dan literasi digital yang memadai untuk membendung hoax di tengah masyarakat. Informasi yang coba digali dari survei yang diadakan oleh Mastel, yaitu berupa informasi mengenai pemahaman tentang hoax, perilaku masyarakat dalam menyikapi hoax, bentuk saluran hoax, dampak hoax terhadap kehidupan, berbangsa dan cara penanggulangan hoax.

Berkaitan dengan informasi sebelumnya, hoax yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan literasi kesehatan ditengah pandemik Covid-9 ini semakin bervariasi. Sejak kemunculannya pada awal Maret 2020,

Covid-19 sendiri sudah banyak menimbulkan banyaknya hoax terkait penyebaran, penularan dan penanganan virus ini. Dapat kita ambil contoh salah satunya ialah pengobatan dengan menggunakan beberapa ramuan rimpang yang diklaim bisa menyembuhkan orang yang terjangkit virus ini, sehingga bahan rimpang seperti jahe yang dianggap sebagai obat Covid-19 menjadi langka dan mengalami kenaikan harga dipasaran. Atau fenomena yang belum lama ini terjadi, salah satu produk susu yang dianggap bisa menangkal virus Covid-19 menjadi rebutan pembeli dan mengalami kekosongan produk dimana-mana. Selain itu, informasi hoax yang juga turut beredar dimasyarakat terkait penyembuhan dari orang yang terjangkit Covid-19 ialah dengan tersebar luasnya daftar obat yang berisi antibiotik, antivirus, dan obat-obatan yang cukup banyak untuk di konsumsi. Pada kenyataannya, penggunaan obat-obatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya resep dokter. Penyebaran banyaknya informasi hoax tersebut menjadi masalah tersendiri dalam proses penanggulangan Covid-19 dalam portal digital (NN : 2021). Hal ini disebabkan dari adanya pemberitaan hoax yang kemudian disebarkan kepada masyarakat yang cukup awam terhadap bidang kesehatan, sehingga golongan masyarakat tersebut melakukan panic buying pada produk-produk yang dikatakan ampuh tersebut.

Seiring dengan berjalannya proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah turut mengupayakan adanya program pemberian vaksin Covid-9 secara massal, dengan harapan terciptanya herd immunity pada masyarakat sehingga kasus penyebaran virus ini semakin dapat ditekan dan dikendalikan maksimal. Berjalannya program vaksin Covid-19 ini diiringi

dengan pemberian informasi terkait pentingnya vaksinasi Covid-19. Hal ini juga dibarengi dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang memiliki kriteria belum dapat divaksinasi karena alasan medis.

Selain penyebaran informasi terkait pengetahuan vaksin Covid-19, nyatanya pada jejaring internet juga banyak didapatkan berita hoax yang terlanjur menyebar luas terkait vaksinasi Covid-19. Disadur dari laman sehatnegeriku milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, banyak masyarakat yang mengaku enggan di vaksin karena khawatir bahwa tubuh mereka akan dimasukkan microchips yang berbarengan dengan penyuntikan vaksin Covid-19. Hal ini jelas dibantah oleh Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, yang menjelaskan bahwa kandungan dari vaksin Covid-19 tersebut ialah berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam (Redaksi:2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberi arahan khusus terkait hal ini, bahwa komunikasi publik terkait vaksinasi Covid-19 harus ditangani dengan sistematis dan searah. Menurut Jokowi, strategi komunikasi publik hendaknya dirancang dengan baik sehingga mampu menjelaskan secara komprehensif kepada publik perihal manfaat vaksin serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Jokowi berharap ketika komunikasi publik baik maka bisa mengurangi disinformasi dan penyebaran hoax di berbagai platform media di Indonesia.

Berdasarkan pada hal tersebut penulis melihat bahwa fenomena penyebaran hoax kesehatan yang banyak tersebar di masyarakat ini memerlukan literasi digital sebagai tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Pada kasus ancaman

hoax ini, pemerintah perlu memberikan informasi kesehatan dan pendidikan singkat terkait menanggapi penyebaran informasi di portal digital yang tidak dapat diterima begitu saja. Hal ini diharapkan dapat membantu membendung hoax terkait pemberitaan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19.

Strategi Pemerintah dalam Mensosialisasikan Program Vaksin Covid-19

Polemik terkait penanggulangan Covid-19 baru baru ini agaknya memasuki fase barunya yaitu sosialisasi program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas. Dari awal pemberitaan akan diadakannya vaksinasi Covid-19 masyarakat terbagi menjadi 2 kubu, yaitu masyarakat yang mendukung adanya vaksin Covid-19 dan masyarakat yang ragu dan cenderung menolak diadakannya vaksinasi Covid-19. Dari kondisi ini pemerintah terus bekerja keras dalam proses penyampaian informasi aktual kepada masyarakat.

Awal tahun 2021, tepatnya Rabu, 13 Januari 2021, pemerintah telah mengaktualisasikan program vaksinasi Covid-19 dengan memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin Covid-19 pertama di Indonesia. Pada tahap pertama pemberian vaksin tersebut, Jokowi beserta beberapa golongan orang yang mendapat prioritas vaksin disuntikkan vaksin Sinovac. Beberapa golongan yang mendapatkan prioritas disini termasuk pejabat, influencer dan pegiat hiburan tahan air. Hal ini merupakan salah satu strategi yang di gunakan pemerintah sebagai ajakan untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Kontradiksi penolakan warga terhadap vaksin Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh negara yang terdampak Covid-19. Menurut survey yang dilakukan oleh Nature Medicine

pada 2021, menunjukkan hasil banyaknya masyarakat global yang ragu akan efektifitas vaksin (vaccine hesitancy) (Laura:2021). Yang menjadikan menarik pada hasil survey ini ialah keragu-raguan masyarakat terhadap vaksin ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah. Sedangkan di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survei online terkait kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19. Hasilnya, 20 persen warga enggan divaksinasi(Genantan:2021). Bilamana alasan yang sama juga berlaku di Indonesia, sudah tentu menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Hal ini karena vaksinasi sendiri menjadi salah satu jalan usaha yang dapat ditempuh di tengah pandemi ini.

Sementara itu, pemerintah mengatur strategi yang salah satunya ialah dengan mengangkat juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi. Dengan mengadakan juru bicara vaksinasi Covid-19 ini, diharapkan satu persatu langkah sosialisasi semakin mudah dan tepat sasaran.

Selain strategi diangkatnya juru bicara sebagai corong awal sosialisasi, penyebaran informasi vaksin Covid-19 secara massif yang dilakukan pemerintah pada berbagai media massa baik cetak, elektronik ataupun digital, kemudian juga melibatkan peran pemuka agama, stakeholder, influencer, dan pegiat seni sebagai media sosialisasi. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin yakin bahwa vaksinasi Covid-19 aman dan perlu dilakukan sebagai ikhtiar menghadapi kondisi seperti saat ini.

Sejalan dengan strategi sebelumnya, program Presiden Jokowi dengan 1 Juta Vaksin 1 hari mulai

memperluas jaringan komunikasi publiknya dengan melibatkan pihak swasta, BUMN, organisasi rumah sakit, profesi, TNI dan Polri, serta organisasi masyarakat untuk memperbanyak sentra atau pos vaksinasi. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga berupaya menambah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyuntikan vaksin dan pemahaman lebih dalam sosialisasi vaksinasi. Hingga saat ini pemerintah dan Sinovac sudah berkomitmen untuk mendatangkan 260 juta dosis vaksin. Tak hanya itu, 11 juta dosis vaksin AstraZeneca dari jalur multilateral dengan Covax facility, 50 juta dosis vaksin AstraZeneca dari jalur bilateral, dan 50 juta dosis vaksin Novavax. (Hermawan:2021). Diharapkan strategi yang sudah sedemikian tersebut dapat mencapai jumlah masyarakat yang telah divaksinasi pada jumlah 70% sehingga terciptalah Herd Immunity masyarakat di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian yang sudah penulis jabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan strategi komunikasi program vaksinasi Covid-19 berkaitan dengan banyak faktor yang saling mempengaruhi, salah satu faktor utama yang paling mempengaruhi ialah keberhasilan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat. Komunikasi publik yang berkaitan langsung dengan komunikasi kesehatan ini perlu dipersiapkan dengan sangat teliti, tepat sasaran proses yang tuntas, strategi yang sistematis dan matang serta pemantauan hasil agar mampu memberikan efek akhir yang positif terhadap tingkat pemahaman masyarakat pada pesan yang disampaikan.

Kemudian dalam kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sosialisasinya. Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah pemerintah harus rutin menggandeng media dalam proses penyampaian informasi secara massal. Pemberian informasi secara terus menerus kepada awak media tentang pentingnya vaksinasi akan mampu menjalankan peran media sebagai saluran edukasi publik, sehingga pesan yang akan disampaikan mampu diterima dan diaktualisasikan secara baik oleh masyarakat.

Kedua, pemerintah harus menetapkan siapa sosok yang akan secara terus menerus memberikan informasi tentang vaksinasi di tahapan awal. Pada hal ini, pemerintah sudah melaksanakan dengan menunjuk juru bicara vaksinasi Covid-19. Hal ini agar sumber informasi yang diberikan terpusat dan tidak terjadi miss persepsi terkait informasi yang beredar.

Kemudian selanjutnya, pemerintah harus mulai melakukan aksi dalam memerangi hoax yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Terutama Hoax yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah pusat, bersama satuan tugas (Satgas) Covid-19 perlu menggandeng kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir platform dan jejaring sosial yang isi informasinya mengarah kepada hoax. Hal ini penting dilakukan dalam memutus jalur penyebaran hoax agar tidak sampai ke masyarakat. Selain itu, untuk menghadapi gempuran hoax yang semakin menjadi, pemerintah perlu membuat konten publikasi literasi yang lebih massal agar berita hoax tertutupi oleh edukasi informasi yang tepat.

Terakhir pemerintah harus mampu menyediakan media khusus

yang selalu dapat diakses oleh masyarakat luas terkait segala hal yang ada sangkut pautnya dengan vaksinasi Covid-19. Untuk saat ini pemerintah sudah memiliki saluran website <https://covid19.co.id> serta beberapa kanal sosial media sebagai penjelasan detailnya. Selain itu pemerintah harus terbuka atas segala masukan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin. Warga bisa memberi masukan pada kolom resmi komentar pada kanal sosial media ataupun memberikan gagasan pada jaringan komunikasi yang pemerintah sediakan. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan pandangan positif masyarakat untuk melakukan vaksinasi secara sukarela dengan penuh kesadaran pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Etik Anjar Fitriarti (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies* P-ISSN : 2356-4490 Vol 4 No 2 September 2019 E-ISSN : 2549-693X

Genantan Saputra, Muhammad. (2021). Strategi Pemerintah Genjot Minat Masyarakat Ikut Vaksinasi Covid-19 <https://www.merdeka.com/peristiwa/strategi-pemerintah-genjot-minat-masyarakat-ikut-vaksinasi-covid-19.html> diakses pada tanggal 26-08-2021 pukul 18.00 WIB

Hermawan, Bayu. (2021). Ini Strategi Pemerintah Percepat Program Vaksinasi Covid-19. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/qv5zh5354/ini-strategi-pemerintah-percepat-program-vaksinasi-covid19> diakses pada tanggal 27-08-2021 pukul 23.00 WIB

Laura Matrajt, Julia Eaton, Tiffany Leung, Dobromir Dimitrov, Joshua, David, and Holly Janes (2021). Optimizing vaccine allocation for COVID-19 vaccines shows the potential role of single-dose vaccination. *Jurnal Nature Communication*. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23761-1>

Muhammad, Arni. (2008) *Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi:Aksara.

NN (2021). Daftar Hoax Covid 19 dan Vaksin Yang Beredar di Masyarakat dan Faktanya.
<https://homecare24.id/2021/07/12/hoax-covid-19-dan-faktanya/> diakses pada tanggal 27-08-2021 pukul 22.30 WIB

People, H. (2010) 'Ajph.94.12.2051', 94(12), pp. 2051–2053. doi:

Rahmadiana, M. (2015) 'Komunikasi Kesehatan : Sebuah TinjauanCovid-19', *Journal Psikogenesis*, 1(1), pp. 88–94. Available at: <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-Online-Psikogenesis/article/view/38/pdf>.

Redaksi Sehat Negeriku (2021). HOAX : Vaksin COVID-19 Mengandung Mikrochip Magnetis
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210528/1137831/hoax-vaksin-covid-19-mengandung-mikrochip-magnetis/> diakses pada tanggal 26-08-2021 pukul 20.30 WIB

Riegelman, R. and Persily, N. A. (2001) 'Health information systems and health communications: Narrowband and broadband technologies as core public health competencies', *American Journal of Public Health*, 91(8), pp.1179–1183. doi: 10.2105/AJPH.91.8.1179.

Susi Artuti Erda Dewi (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care : Jurnal Kesehatan* 10 (1) Juni 2021 (162-167).